

WAWASAN

Jurnal Ilmiah Agama dan Sosial Budaya



M. TAUFIQ RAHMAN
PLURALISME POLITIK

ALI MASRUR
NABIA ABBOTT (1887-1981) TENTANG PERTUMBUHAN ISNÂD
DAN PERIWAYATAN HADITS SECARA TERTULIS

WAWAN HERNAWAN
KONSEP KETUHANAN YESUS KRISTUS MENURUT GEREJA
MASEHI ADVENT HARI KETUJUH

HASAN MUD'IS
SPIRITUALITAS DAN KERESAHAN MANUSIA MODERN

Diterbitkan:
FAKULTAS USHULUDDIN
UIN SUNAN GUNUNG DJATI BANDUNG

PLURALISME POLITIK

M. Taufiq Rahman

(Pengajar di Fakultas Ushuluddin UIN Sunan Gunung Djati Bandung)

Kontak: Jl. Tonjong Hariang Buah Dua RT21/05 Sumedang, tlp. 081395098951

Email: fikrakoe@yahoo.com

Abstract

This article focuses on political pluralism: its career of concept, discourses, and criticism. Besides its critics, pluralism has a powerful influence in the world of nation-states. The concept of pluralism, in political sense, begins to be worldly accepted in 1960s, especially in the Western world. From now on country after country, both industrialized and developing, come into the need of the politicization of pluralism. It is because of the differences of religious, ethnic, linguistic, regional, and racial differences have become more salient reference points in the political process. Based on majorly Western literature this article answers theoretical problems of pluralism. It is hoped that this political pluralism gives some highlights on other areas of pluralism, including theology.

Key Words

Pluralisme, pilsafat politik, pilsafat sosial, equilibrium, comparative sociology

A. Pendahuluan

Pada asalnya, masyarakat itu relatif homogen baik secara ras, etnis ataupun agama.¹ Dalam perkembangan selanjutnya masyarakat menjadi majemuk (plural) atau pluralistik.²

Dari segi asal muasal, penaklukan dapat disebut sebagai salah satu faktor yang menimbulkan pluralisme. Pengalaman seorang ekonom kolonial mengenai sebab penjajahan dalam memunculkan pluralisme ini dapat dikutip seperti ini:

Di Burma, sebagaimana di Jawa, barangkali hal yang pertama yang mengejutkan pengunjung adalah rangkaian bangsa-bangsa -Eropa, Cina, India, dan penduduk pribumi. Ini secara ketat disebut sebagai rangkaian, karena mereka bercampur tetapi tidak bergabung. Setiap kelompok memeluk agama, budaya dan bahasanya sendiri-

sendiri, dalam pemikiran dan caranya sendiri-sendiri. Sebagai individu mereka bertemu, tetapi hanya di pasar, dalam jual beli.³

Ada juga pluralisme dengan migrasi. Terdapat komunitas-komunitas Yahudi dan Kristen di Madinah, Khaybar, Tayma', Nejd dan Selatan Arabia pada saat munculnya masyarakat Muslim di Jazirah Arabia.⁴ Dan ada juga pluralisme dengan cara perbudakan, misalnya terdapat orang-orang kulit hitam Ethiopia pada masa Nabi Muhammad.⁵

Dalam sejarahnya, imperium Islam selalu menghadapi pluralisme. Dalam pluralisme ini mereka mampu memerintah dengan cukup aman atas berbagai bangsa yang berbeda latar

¹Ahmad Yousif, *Islam, Minorities and Religious Freedom: A Challenge to Modern Theory of Pluralism*, *Journal of Muslim Minority Affairs*, Vol. 20, No. 2, 2000, hlm. 29.

²Saya tidak hendak membedakan kata "plural" dan "pluralistik" dalam seluruh tulisan ini. Namun bagi Smith, "plural" merujuk pada model masyarakat seimbang (*equilibrium*) dan "pluralistik" menunjukkan pada model masyarakat konflik. Lihat M. G. Smith, *The Plural Society in the British West Indies*, Berkeley: University of California Press, 1965, *passim*.

³Furnivall dalam M. G. Smith, *ibid.*, hlm. 75.

⁴Menurut Saunders, komunitas ini terbentuk oleh imigran Palestina setelah keruntuhan Yerusalem yang dihancurkan oleh Nebuchadnezzar pada tahun 586 SM. J.J. Saunders, *The History of Medieval Islam*, London: Routledge & Kegan Paul, 1982, hlm. 11; Christopher Toll, 'The Purpose of Islamic Studies', dalam Klaus Ferdinand and Mehdi Mozaffari (eds.), *Islam: State and Society*, Copenhagen: Scandinavian Institute of Asian Studies, 1988, hlm. 13.

⁵Spencer-Trimingham, *Christianity Among the Arabs in Pre-Islamic Times*, London: Longman, 1979, hlm. 249.

belakang ras, etnis, dan bahasa.⁶ Adanya kontak dengan budaya lain, selain Arab-Islam, mereka menemukan agama lain. Orang-orang non-Muslim, yang dimotivasi oleh 'keuntungan bisnis, melakukan misi, dan pencarian pengetahuan beserta penggunaan praktisnya'⁷ telah memberikan kondisi pluralistik pada sejarah Islam.

Ringkasnya, sampai zaman modern awal, pluralisme lahir dengan cara kolonialisme atau migrasi, dengan cara perbudakan atau semata-mata dengan cara kontak. Semua proses ini menimbulkan kondisi pluralisme.⁸ Bahkan, pada zaman modern, masyarakat plural itu tidak dapat dihindarkan. Terdapat pluralisme di setiap masyarakat.⁹ Belakangan ini pluralisme itu menjadi lebih pluralistik daripada sebelumnya. Ia ditandai tidak hanya dengan kepelbagaian religius, etnis, budaya, dan bahasa, tetapi juga ditandai oleh perbedaan kelas, status, pekerjaan, dan sebagainya.¹⁰

Secara teoretis, masyarakat itu pluralistik sejauh mereka menunjukkan dua gambaran dasar, 1) Segmentasinya ke dalam kelompok-kelompok korporat yang seringkali, walaupun tidak seharusnya mempunyai perbedaan budaya atau subkultur; dan, 2) struktur sosial

yang terbagi-bagi ke dalam susunan institusi yang analogis, paralel, non-komplementer tetapi dapat dibedakan.¹¹ Di antara susunan-susunan institusi itu sistem institusional dasar yang menganut kekerabatan, pendidikan, agama, harta dan ekonomi, rekreasi, dan soliditas-soliditas tertentu.¹²

Secara geografis, esensi masyarakat itu plural. Negara-negara plural merupakan wilayah bersama yang di situ hidup bersama kelompok-kelompok yang berbeda satu sama lain dalam berbagai cara. Jadi, batas-batas yang memisahkan kelompok-kelompok dan wilayah-wilayah yang dapat dipisahkan ke dalam unit-unit yang berlainan, (seperti nasionalisme yang menciptakan bangsa-bangsa dari sekumpulan orang-orang), baik itu berupa negara, wilayah-wilayah otonom atau wilayah-wilayah administratif, merepresentasikan ketidakmampuan orang-orang dalam wilayah tertentu sebagai ada (eksis) di dalam kerangka plural.¹³

Secara mekanis, masyarakat plural itu adalah masyarakat dengan bagian-bagian yang berbeda dari komunitas yang hidup berdampingan, tetapi terpisah di dalam unit politik yang sama atau sistem relasi sosial yang sama.¹⁴

Setiap masyarakat mempunyai sistem hubungan sosialnya tersendiri. Dan pluralisme adalah satu dari sistem hubungan sosial tersebut, karena pluralisme itu adalah "a complex of relationships between groups in a wider society".¹⁵ Detail tentang tempat hubungan tersebut dalam suatu masyarakat dapat dijelaskan sebagai berikut:

Masyarakat itu adalah sistem hubungan sosial yang cukup-diri, langgeng-diri, dan secara internal otonom. Sistem tersebut membedakan penduduk menempati

⁶Yvonne Y. Haddad, *Islamists and the Challenge of Pluralism*, Occasional Papers, Center for Contemporary Arab Studies and Center for Muslim-Christian Understanding, Georgetown University, 1995, hlm. 21.

⁷Christopher Toll, *loc. cit.*

⁸Engineer menyatakan bahwa dulu di Mekkah tidak ada tanda-tanda masyarakat terstruktur misalnya kepemimpinan dan pembayaran pajak. Upaya untuk menegakkan jenis kepemimpinan oleh seorang Kristen yang didukung Byzantium, Uthman bin Huwayrith, adalah gagal. Asghar Ali Engineer, *Devolusi Negara Islam*, terjemahan Imam Mutaqin, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2000, hlm. 21. Cf. Ibn Khaldun, *The Muqaddimah*, diterjemahkan ke dalam Bahasa Inggris oleh Rosenthal and diringkaskan oleh N.J. Dawood, Princeton University Press, 1970, hlm. 118.

⁹Mazru'i, *Pluralism and National Integration*, dalam Kuper and Smith (eds.), *Pluralism in Africa*, Berkeley: University of California Press, 1969, hal. 347.

¹⁰Smith, *ibid.*, h. 82; Nurit Kliot and Stanley Waterman (eds.), *Pluralism and Political Geography: People, Territory and State*, New York: St. Martin's Press, 1983, hal. 315.

¹¹Pierre L. van den Berghe, *Pluralism and the Polity: A Theoretical Exploration*, dalam Kuper and Smith (eds.), *ibid.*, hlm. 67.

¹²Smith, *The Plural Society*, hlm. 82.

¹³Nurit Kliot and Stanley Waterman (eds.), *op. cit.*, hlm. 313.

¹⁴Furnivall dalam Smith, *op. cit.*, hlm. 75.

¹⁵Ali A. Mazru'i, dalam Kuper, hlm. 333.

wilayah tertentu; tetapi sebagai sistem hubungan sosial, masyarakat itu jelasnya berbeda secara wilayah atau penduduk. Masyarakat adalah struktur hubungan yang dengannya, penduduk secara internal terorganisasi sebagai penduduk bersama wilayah tertentu. Perubahan-perubahan dalam masa atau komposisi penduduk, atau secara lebih jelasnya dalam wilayah, tidak secara langsung membentuk perubahan-perubahan dalam sistem sosial, walaupun perubahan-perubahan itu secara tidak diragukan lagi mempengaruhi dalam banyak cara. Adalah dengan perbedaan-perbedaan dalam sistem hubungan sosial yang membentuk masyarakat itulah yang memunculkan perbedaan-perbedaan antara pluralisme, homogenitas, dan heterogenitas itu.¹⁶

Selama interaksi antara masyarakat-masyarakat itu akan terjadi proses pluralisme kultural yang tidak dapat dihindarkan, karena setiap masyarakat mempunyai budayanya sendiri.¹⁷ Pluralisme kultural biasanya merujuk pada kepelbagaian berdasarkan atribut-atribut rasial, religius, linguistik atau atribut etnis lainnya.¹⁸ Pluralisme kultural ini lagi-lagi merupakan fakta historis. Furnivall mengatakan pada kita cerita tentang kolonisasi bahwa masyarakat kolonial tropis setelah adanya kontak dua prinsip kehidupan sosial yang bertentangan: sistem tropis yang berdasar pada agama, adat-istiadat personal dan kewajiban-kewajiban, dan sistem Barat yang berdasar pada akal, hukum impersonal, dan hak-hak asasi.¹⁹

Berdasarkan pada kondisi yang secara sosial pluralistik, secara kultural pluralistik, yang disebut di atas, maka secara politis ia juga harus

pluralistik.²⁰ Mari kita lihat apa yang terjadi pada respons atas pluralitas dengan respon-respon sosio-politis. Poinnya adalah bahwa diskursus pluralisme adalah diskursus tentang bagaimana membuat sistem hubungan sosial berdasarkan pada kondisi pluralitas. Dengan demikian, diskursusnya itu kebanyakannya didiskusikan, pertama-tama, dalam wilayah politik. Untuk mendiskusikan pluralisme dalam wilayah lain, dengan demikian, orang harus membahasnya dalam diskursus politik tentang pluralisme sebagai tahapan awal.

B. Diskursus Politik tentang Pluralisme: Equilibrium dan Konflik

Dalam wilayah politik, karakteristik-karakteristik tambahan yang seringkali diasosiasikan dengan pluralisme adalah sebagai berikut:

- 1) relatif absennya konsensus nilai;
- 2) relatif adanya heterogenitas kultural;
- 3) relatif adanya konflik antara kelompok-kelompok korporat penting;
- 4) relatif otonomi antara bagian-bagian sistem sosial;
- 5) relatif pentingnya pemaksaan dan interdependensi ekonomi sebagai basis integrasi sosial;
- 6) dominasi politik oleh satu dari kelompok-kelompok korporat atas yang lain; dan
- 7) dominannya hubungan-hubungan khusus yang segmental, utilitarian, non-afektif, and fungsional antara kelompok-kelompok korporat dan ikatan-ikatan total yang non-utilitarian, apektif, dan tersebar di dalam kelompok-kelompok tersebut.²¹

Sistem apa yang harus menjawab kondisi-kondisi pluralisme di atas?

Secara politik, jawabannya berbeda, beberapa negara berniat untuk menyatukan pluralisme dan sebagian negara lain berniat

¹⁶Smith dalam Kuper and Smith (eds.), *Pluralism in Africa*, Berkeley: University of California Press, 1969, hlm. 29-30.

¹⁷Smith, *The Plural Society*, hlm. 78.

¹⁸Nurit Kliot and Stanley Waterman, *op. cit.*, hlm. 312.

¹⁹Furnivall, *Plural Societies: Perspectives and Problems*, dalam Kuper and Smith (eds.), *op. cit.*, hlm. 13.

²⁰Yvonne Y. Haddad menjelaskan bahwa pluralisme adalah istilah yang fleksibel, "used to refer to a variety of contradictory conditions, and a complicated concept that at times refers to cultural differences and at other times to social or political pluralism", Haddad, *op. cit.*, hlm. 19.

²¹Van den Berghe dalam Kuper and Smith (eds.), *op. cit.*, hlm. 68.

untuk tetap dalam kondisi pluralistik. Yang pertama berdasarkan pada konsepsi Totalitarian (yang paling menonjol adalah yang Marxian) atau model konflik, yang kedua berdasarkan pada konsepsi Liberal atau model equilibrium.²²

Beberapa kontras adalah sebagai berikut, konsepsi Liberal cenderung mengkompromikan antara kelompok-kelompok dan yang Marxian cenderung mensintesis mereka. Kompromi cenderung menjadi posisi di bawah ideal; sintesis Marxian merupakan langkah yang mendekati kesempurnaan. Kompromi menyatukan bukan apa yang terbaik, tetapi apa yang kurang ditolak oleh para kontestan. Sintesis menggabungkan elemen-elemen yang terbaik dari setiap sisi. Dari kompromi antar kepentingan-kepentingan yang bertentangan akan muncul keinginan bersama dan dari sintesis atas kepentingan-kepentingan akan timbul kehendak bersama atau kebaikan kolektif. Proses integrasi dalam sistem liberal merupakan respons pada pengalaman kumulatif atas resolusi konflik dan dalam teori Marxian itu dengan mekanisme perjuangan dan kontradiksi. Marxian berpikir tentang resolusi konflik dalam kerangka kemenangan absolut tetapi Liberalis memikirkannya dalam kerangka penyesuaian-penyesuaian. Untuk Marxisme, penekanan terus-menerus menciptakan kesadaran kelas di antara orang-orang yang tertindas tetapi untuk Liberalisme penekanan terus-menerus membantu menciptakan kesadaran nasional.²³

Menurut Kuper, masyarakat dalam model equilibrium berbeda dari masyarakat dalam model konflik. Istilah itu sendiri menunjukkan jenis kondisi psikologis yang berbeda: yang pertama adalah masyarakat optimistik dan yang

kedua mendeskripsikan masyarakat pesimistik.²⁴ Masyarakat equilibrium adalah masyarakat teratur yang dikarakterisasi oleh disensus dan pluralisme kultural dan masyarakat konflik adalah masyarakat terintegrasi yang dicirikan oleh konsensus dan homogenitas budaya.²⁵

Dalam model equilibrium, otonomi institusi dan independensi organisasi-organisasi perantara mempromosikan penyebaran kuasa dan kepelbagaian kepentingan: kompetisi antara kelompok-kelompok kepentingan memunculkan penyesuaian yang seimbang. Sebaliknya, dalam model konflik, independensi bagian-bagian budaya mengimplikasikan akhir dari masyarakat; konflik antar-bagian mengancam eksistensi masyarakat.²⁶

Dalam model equilibrium, integrasi tergantung pada *relasi-relasi fungsional* antara institusi-institusi dan nilai-nilai bersama, atau pada keseimbangan kompetitif dan dinamis antara pluralitas kelompok-kelompok independen dengan fungsi-fungsi yang terbatas dan afiliasi-afiliasi yang berganda dari anggota-anggotanya. Namun, dalam model konflik, mekanisme yang mengikatnya adalah peraturan pemerintah, dan akhirnya, kekuatan.²⁷

Dalam model equilibrium, ikatan antara bagian-bagian plural adalah utama, dan negara, sebagai entitas politik, mengekspresikan integrasi sosial dasar ini. Dalam model konflik, negara mendahului dan membentuk masyarakat; di sini negara itulah yang primer.²⁸ Singkatnya, yang pertama memakai manajemen *bottom-up* dan yang kedua memakai manajemen *top-down*. Untuk masyarakat itu sendiri, yang pertama cenderung memunculkan interdependensi yang menaik antara bagian-bagian yang berbeda dalam masyarakat sementara yang kedua

²²David R. Smock and Audrey C. Smock, *The Politics of Pluralism, A Comparative Study of Lebanon and Ghana*, New York/Oxford/Amsterdam, Elsevier, 1975, hal. 10. Dahl (1980) menggunakan istilah pluralisme bertentangan (*conflictive pluralism*) untuk yang pertama dan pluralisme organisasional untuk yang terakhir. Lihat Kliot and Waterman (eds.), *op. cit.*, 1983, hlm. 1.

²³Mazru'i dalam *op. cit.*, hlm. 338-341.

²⁴Kuper dalam *ibid.*, hlm. 10

²⁵*Ibid.*, hlm. 17.

²⁶*Ibid.*

²⁷*Ibid.*

²⁸*Ibid.*, hlm. 17-18.

cenderung meningkatkan ketergantungan pada negara.²⁹

Model pluralisme equilibrium mengadopsi definisi yang lebih inklusif dari istilah pluralisme itu dan secara empiris berdasarkan pada masyarakat yang pluralistik secara moderat. Model konflik mendefinisikan pluralisme secara lebih sempit, dan mencari pelabuhan empiris dalam masyarakat kolonial atau budak yang sangat pluralistik.³⁰ Model equilibrium itu relatif demokratis tetapi model konflik itu agak despotik.³¹

Model equilibrium mempostulatkan dua prinsip dasar integrasi sosial dalam politik pluralistik. Yang pertama tentang jaringan kompleks dari afiliasi berganda, yang menyilang garing-garis pecahan kelompok, dan menggeser penjaran garis kelompok tergantung pada isu-isu spesifik. Yang lain adalah ukuran konsensus yang luas tentang nilai-nilai dan tentang aturan main politik. Pluralisme dalam model konflik itu diasosiasikan dengan *kuasa minoritas despotik* dan dengan relatif kurangnya konsensus pada nilai-nilai yang melegitimasi politik yang ada dan norma-norma yang mengatur perilaku politik. Ia dilakukan dengan paksaan dan teknologi kekerasan.³²

Maka, kedua model pluralisme tersebut mensyaratkan adanya hubungan yang menyilang dan mengikat variabel kritis. Dalam model equilibrium model keduanya menyediakan mekanisme integratif yang menjaga kesatuan masyarakat dan dalam model konflik ketiadaan anggapan total dari institusi-institusi bersama membawa masyarakat pada pembebanan dari kontrol otoritarian kaum minoritas.³³

Walaupun ada dua jenis respons politik atas pluralisme, yang biasa diasosiasikan dengan pluralisme adalah yang liberal. Pluralisme tidak hanya semata-mata masyarakat dengan pluralitas. Semua masyarakat mempunyai pluralitas. Apa yang membedakan pluralisme

dari yang lain adalah jenis pluralitas yang terlibat. Edward A. Shills menyatakan bahwa liberalisme atau demokrasi liberal adalah realisasi ideal dari prinsip-prinsip pluralisme.³⁴ Liberalisme (sistem demokrasi individualistik) dikarakterisasi oleh keseimbangan yang tepat antara wilayah-wilayah sosial.³⁵ Adalah perlu untuk dicatat, istilah "pluralisme" dan "demokrasi liberal (atau liberalism saja)" dapat digunakan secara bertukaran.³⁶ Dengan demikian, seluruh penjelasan berikut yang dihubungkan dengan pluralisme adalah dalam artian demokrasi liberal.

C. Equilibrium: Beberapa Persyaratan

1) Struktur-struktur dalam Pluralisme

a) *Kelompok-kelompok Perantara*

Pluralisme, dalam bentuknya sebagai demokrasi Liberal (model equilibrium), dilaksanakan tergantung pada "teori kelompok dalam politik". Teori ini, pada gilirannya, diasumsikan untuk melihat kelompok-kelompok sebagai mempunyai kepentingan diri yang sempit dan melihat politik demokrasi sebagai proses dari gabungan adu tawar dan pergulatan antara kelompok-kelompok ini dan meyakini bahwa hasil dari proses ini adalah kepentingan publik.³⁷

Dengan demikian, pembangunan kepentingan publik atau kepentingan sosial -dan itu adalah demokrasi- itu sendiri tergantung tidak hanya kepada hak pilih orang dewasa dan supremasi anggota legislatif terpilih, tetapi pada semua organisasi perantara yang menghubungkan individu pada keseluruhan.³⁸ Kelompok-kelompok perantara ini diikat oleh

³⁴Kornhauser juga menemukan dalam pluralisme suatu dasar bagi demokrasi liberal. Van den Berghe menyatakan bahwa pluralisme merupakan satu dari syarat-syarat penting untuk mendirikan demokrasi. Kuper and Smith (eds.), *op. cit.*, hlm. 8 dan 67.

³⁵Kuper and Smith (eds.), *op. cit.*, h. 9.

³⁶J. Roland Pennock, *Democratic Political Theory*, New Jersey: Princeton University Press, 1979, hlm. 509-512.

³⁷*Ibid.*, hlm. 513.

³⁸Reginald J. Harrison, *Pluralism and Corporatism: The political evolution of modern democracies*, London, George Allen & Unwin, 1980, hlm. 66.

²⁹*Ibid.*, hlm. 21.

³⁰Van den Berghe dalam Kuper, *ibid.*, hlm. 72.

³¹*Ibid.*, hlm. 74.

³²*Ibid.*, hlm. 73.

³³Smock and Smock, *op. cit.*, hlm. 11-12.

loyalitas-loyalitas yang bersilangan, dan oleh nilai-nilai bersama atau keseimbangan kuasa yang kompetitif. Ini dikonsepsikan pada penghindaran konflik yang ekstrem di dalam penyesuaian kepentingan-kepentingan kelompok.³⁹ Adanya kelompok-kelompok perantara, pada akhirnya, akan memberi kontribusi pada pelangngan pluralisme politik.⁴⁰

Ada tiga jenis kelompok yang dapat dilibatkan dalam masyarakat pluralis partisipatif dan pada saat yang sama dapat menjadi kelompok-kelompok penekan: kelompok-kelompok non-asosiasional, institusional dan asosiasional. Kelompok-kelompok 'non-asosiasional' merujuk pada kelompok-kelompok kekerabatan, pengelompokan kepentingan etnik dan regional dan kelompok lain yang dapat diidentifikasi tetapi tidak terorganisir.⁴¹ Namun demikian, jenis kelompok ini sangat solid dan emosional. Clifford Geertz menyebutnya sebagai "kelompok primordial."⁴² Dan von Beyme menamakannya sebagai "kelompok marginal dan regional."⁴³

Kelompok-kelompok 'institusional' adalah kelompok yang mempunyai anggota dan organisasi formal yang ditujukan lebih untuk fungsi-fungsi politik atau sosial daripada artikulasi kepentingan anggota mereka. Legislatif (termasuk partai), birokrasi, gereja, dan perusahaan industri besar, tentara, media massa, adalah di antara institusi-institusi tersebut.⁴⁴

Yang terakhir, kelompok-kelompok 'asosiasional' merupakan struktur-struktur terspesialisasi dari artikulasi kepentingan: serikat pedagang, federasi pemilik modal, organisasi etnik, kelompok sipil, dan kelompok kepentingan lainnya.⁴⁵

Melalui manajemen yang teliti atas komunalisme, suatu sistem politik dapat menyalurkan kelompok-kelompok ini ke dalam kompetisi politik yang damai dan penuh dukungan.⁴⁶ Pemerintah, dengan demikian, menyesuaikan sistem politik dari masyarakat plural untuk menjawab berbagai masalah dan mencegah pertikaian.⁴⁷

b) Afiliasi-afiliasi Berganda

Kornhauser bersikukuh atas afiliasi berganda sebagai syarat lanjutan dari pluralisme. Di sini, asosiasi-asosiasi yang berbeda, seperti asosiasi etnis, dapat saja menjadi sangat inklusif, mencakup banyak aspek dari kehidupan anggotanya, dan dengan demikian mendorong perpecahan sosial, loyalitas yang terbelah, dan ketundukan pada kuasa otoritarian.⁴⁸ Maka, afiliasi berganda menandakan sangat pentingnya kebebasan individual di dunia nilai atau sistem nilai (yaitu budaya) yang saling bertentangan dan tidak dapat dikurangi.⁴⁹

Terlebih lagi, setiap saat, individu dalam masyarakat plural secara potensial adalah anggota dari lebih dari satu kelompok komunal sejak beberapa tipe kategori askriptif ada dan batasan mendefinisikan sejenis entitas komunal spesifik dapat digambarkan pada level-level keinklusi yang bervariasi.⁵⁰

Singkatnya, untuk individu, afiliasi pada suatu kelompok merupakan refleksi dari lapangan interaksi sosial. Lingkungan khusus, isu yang terlibat, ukuran arena, waktu yang berjalan, dan sifat antagonis semuanya mempengaruhi ikatan-ikatan komunal dari individu atau kelompok yang ada. Konsekuensinya, "kepantasan politik atau ekonomi

³⁹Kuper and Smith (eds.), *op. cit.*, hlm. 8.

⁴⁰Kornhauser seperti dirujuk oleh Kuper dalam Kuper and Smith (eds.), *ibid.*, hlm. 9.

⁴¹Harrison, *op. cit.*, hlm. 67.

⁴²Clifford Geertz sebagaimana dikutip oleh Smock and Smock, *op. cit.*, 8-9.

⁴³Nurit Kliot, *op. cit.*, hlm. 4.

⁴⁴Harrison, *loc. cit.*

⁴⁵*Ibid.*

⁴⁶Smock, *op. cit.*, hlm. 14.

⁴⁷Nurit Kliot and Stanley Waterman (eds.), *op. cit.*, hlm. 4.

⁴⁸Kuper, *loc. cit.*

⁴⁹Jonathan Riley, *Defending Cultural Pluralism: Within Liberal Limits, Political Theory*, Vol. 30, Number 1, February 2002.

⁵⁰Smock, *op. cit.*, hlm. 13.

dapat mengenalkan elemen pilihan sadar diantara pilihan-pilihan yang terbuka."⁵¹

c) *Representasi: Adanya Elite*

Menurut Pennock, demokrasi liberal dan pluralistik adalah antara otokrasi dan anarki (voluntarisme); dan antara dominasi dan kerjasama terdapat sebetulnya "demokrasi partisipatif" dan "kepemimpinan".⁵² Tidak ada model yang ekstrem, baik kepemimpinan besar ataupun ketiadaan pemimpin. Keduanya itu memuaskan. Yang pertama gagal untuk memuaskan klaim normatif dari teori demokrasi, sementara yang kedua itu secara operasional tidak realistis.⁵³ Antara kedua ekstrem itu terdapat teori pluralistik yang diwakili oleh elit-elit yang terbagi-bagi.⁵⁴

Secara mekanis, dalam sistem pluralistik, institusi-institusi harus mendorong pemilihan pemimpin. Ia merujuk pada keseimbangan kuasa-kuasa kompetitif. Selama kebijakan-kebijakan penting itu dibuat secara sentral tidak semua kepemimpinan dapat atau harus dibubarkan. Terlebih lagi, kompetisi untuk posisi-posisi kepemimpinan sentral -dalam bentuk kampanye-kampanye pemilu-akan memainkan peran pendidikan dan pembangunan yang paling berharga.⁵⁵ Dalam pluralisme politik, akhirnya, terdapat keperluan untuk otonomi para elit.⁵⁶

Elit-elit tersebut, pada gilirannya, harus bekerja sama diantara mereka sendiri. Dalam merespons pluralisme di Belanda, model demokrasi konsosiasional ala Lijphart menekankan empat karakteristik elit sebagai prasyarat bagi penahanan atas ketegangan-ketegangan komunal: (1) pengakuan atas bahaya dalam sistem politik yang terfragmentasi, (2) komitmen untuk melanggengkan sistem, (3) keinginan (sekurang-kurangnya pada kejadian-kejadian tertentu) untuk mengatasi garis-garis pemisah, dan (4) kemampuan untuk

memformulasikan solusi-solusi yang tidak akan memecah-belahkan pada tuntutan-tuntutan kelompok konstituen.⁵⁷

d) *Keseimbangan Kuasa*

Pluralisme dapat memfasilitasi gabungan langsung dari kelompok-kelompok komunal ke dalam sistem politik: (1) distribusi jabatan-jabatan politik dan posisi-posisi administratif pada kelompok-kelompok komunal utama secara tepat merupakan proporsional pada persentase dari penduduk yang dibentuk mereka, (2) alokasi fasilitas dan sumber-sumber ekonomi dalam cara yang adil sehingga setiap kelompok atau wilayah mendapatkan bagiannya yang adil, (3) pembangunan saluran-saluran komunikasi dengan kelompok-kelompok agar dapat mengizinkan mereka mengartikulasikan tuntutan mereka, (4) pelanggaran forum-forum institusional yang di dalamnya perwakilan dari berbagai kelompok bertemu untuk diskusi dan adu tawar, dan (5) adopsi sistem pemilu yang mengurangi insentif-insentif untuk tarikan-tarikan komunal dan meningkatkan tekanan untuk kerjasama.⁵⁸

Dengan kata lain, pluralisme menyetujui legitimasi pada solidaritas-solidaritas parochial di dalam sistem masyarakat dengan menggabungkannya pada sistem politik.⁵⁹ Sistem orientasi-kelompok ini berupaya untuk menangani tekanan dan konflik melalui adu tawar yang terstruktur dan alokasi proporsional atas sumber-sumber dan kesempatan-kesempatan di antara entitas-entitas komunal.⁶⁰ Pluralisme seimbang, kemudian, dapat menciptakan kondisi-kondisi bagi kompetisi terbuka dan untuk manajemen konflik.⁶¹ Milton Esman mengajukan model acuan atas manajemen konflik yang di dalamnya pemerintah (1) tidak hanya semata-

⁵¹Ibid.

⁵²Pennock, *op. cit.*, hlm. 476-477.

⁵³Ibid., hlm. 481.

⁵⁴Raymond Aron dalam Kuper, *op. cit.*, hlm. 9.

⁵⁵Pennock, *op. cit.*, hlm. 497.

⁵⁶Aron dalam Kuper, *op. cit.*, hlm. 23.

⁵⁷Arend Lijphart, *The Politics of accommodation: Pluralism and Democracy in the Netherlands*, Berkeley, University of California Press, 1968, hlm. 199-211.

⁵⁸Smock, *op. cit.*, hlm. 18.

⁵⁹Ibid., hlm. 17.

⁶⁰Ibid.

⁶¹Ibid.

mata bereaksi atas krisis komunal untuk mencegahnya, dan (2) mendorong dan menstrukturkan komunikasi antar kelompok untuk mempromosikan kebiasaan-kebiasaan berpikir, memutuskan dan berperilaku akomodatif dalam penduduk.⁶²

Struktur politik masyarakat dalam model "equilibrium" bersifat plural. Sistem *checks and balances* konstitusional didesain untuk memisahkan kuasa di antara sektor-sektor legislatif, eksekutif/administratif, dan yudikatif, dan dalam cara ini meyakinkan pluralisme dalam struktur otoritas. Pergulatan kuasa oleh partai-partai dan pemimpin-pemimpin politik dilihat sebagai kawan politik plural dari pluralisme sosial dari kelompok-kelompok kepentingan yang berkompetisi, dan sebagai basis kekuasaan demokrasi.⁶³

Adalah penting untuk dicatat bahwa dalam masyarakat pluralistik adopsi rumusan untuk kuasa politik bersama mempunyai keuntungan-keuntungan meninggalkan komposisi pemerintahan pada kemajemukan dinamika politik.⁶⁴ Pandangan berikut adalah penegasan Dahl atas kepercayaannya pada pluralisme Amerika:

*"The fundamental axiom in the theory and practice of American pluralism is, I believe, this: Instead of a single center of sovereign power there must be multiple centers of power, none of which is or can be wholly sovereign. Although the only legitimate sovereign is the people, in the perspective of American pluralism even the people ought never to be an absolute sovereign; consequently no part of the people, such as a majority, ought to be absolutely sovereign"*⁶⁵

2) Proses-proses dalam Pluralisme

a) Integrasi

Walaupun solidaritas-solidaritas kelompok itu berdasarkan identitas-identitas religius, etnis, rasial atau linguistik sering menganjurkan perilaku politik yang emosional, tidak kompromi, keras daripada asosiasi-asosiasi yang merefleksikan tipe-tipe pembelahan sosial yang

lain, semuanya dapat diatur. Isunya harus dilihat dalam bentuk bagaimana mungkin mencapai akomodasi komunal di dalam kerangka sistem politik plural.⁶⁶ Dalam sistem politik yang di dalamnya kelompok-kelompok komunal mempunyai rasa keamanan dan saling bertoleransi, loyalitas pada komunitas nasional dapat secara sepenuhnya konsisten dengan kelangsungan integritas entitas-entitas komunal.⁶⁷

Namun, tidak ada dominasi absolut atas nilai-nilai bersama⁶⁸ dan dari motivasi bersama dalam masyarakat plural. Konsekuensinya, masyarakat harus dipegang bersama dengan regulasi⁶⁹ melalui pemahaman dan persetujuan yang secara luas dimiliki dan dihormati.⁷⁰ Regulasi ini terkandung dalam pengaturan yang kaku dan hierarkis atas hubungan-hubungan antara bagian-bagian yang berbeda.⁷¹ Selain otoritas dan kuasa, regulasi itu sangat penting dalam menyatukan masyarakat.

Secara teoretis, integrasi dalam masyarakat plural dapat dibagi ke dalam empat kategori:

⁶⁶Smock, *op. cit.*, hlm. 6.

⁶⁷*Ibid.*, hlm. 14-15.

⁶⁸Namun, nilai-nilai bersama absolut yang ideal dapat direalisasikan oleh sikap-sikap politik tertentu. Menurut Edward A. Shils, nilai-nilai bersama itu adalah: 1) sentimen-sentimen afinitas komunal di antara elit, 2) penghormatan atas kuasa hukum (*the rule of law*) dan percaya pada kesuciannya, 3) kesederhanaan dalam keterlibatan politik, 4) komitmen pada perubahan gradual, dan 5) pengakuan pada kehormatan nilai-nilai dan aktivitas-aktivitas lain di dalam masyarakat. Lihat Kuper, *op. cit.*, hlm. 9. Dalam peristilahan praktis, nilai-nilai bersama dapat disebut sebagai kepentingan publik. Kepentingan publik itu dilihat sebagai "suatu rumusan dari kepentingan-kepentingan pribadi." (*a sort of summation of private interests.*) Bentham seperti dikutip oleh Pennock, *op. cit.*, hlm. 511).

⁶⁹Kuper, *op. cit.*, hlm. 13.

⁷⁰Dahl menyatakan bahwa pemahaman dan persetujuan ini, dalam banyak kasus, diekspresikan di dalam konstitusi-konstitusi tertulis yang tidak dapat diamandemen secara cepat dan mudah. Konstitusi itu dianggap sebagai sangat mengikat. Robert A. Dahl, *Pluralist Democracy in the United States, Conflict and Consent*, Chicago: Rand Mc. Nally & Co, 1967, hlm. 23.

⁷¹Kuper, *loc. cit.*

⁶²Esman dalam Smock, *ibid.*

⁶³Kuper, *op. cit.*, hlm. 8-9.

⁶⁴Smock, *op. cit.*, hlm. 18.

⁶⁵Dahl, *op. cit.*, hlm. 24.

koeksistensi, kontak, kompromi, dan persetujuan diam-diam (*coalescence*). Kelompok-kelompok dalam hubungan koeksistensi tidak perlu tahu eksistensi masing-masing. Hubungan yang bersifat kontak adalah kelompok-kelompok mempunyai sedikitnya hubungan-hubungan minimal tertentu atau komunikasi satu sama lain. Dalam hubungan yang bersifat kompromi, hubungan-hubungan antar kelompok telah menjadi begitu kompleks, terpecah, dan saling tergantung untuk menuntut cuaca rekonsiliasi damai antara kepentingan-kepentingan yang bertentangan. Dan dalam level *coalescence* terdapat persetujuan diam-diam atas identitas, sejenis identitas total.⁷² Proses integrasi, dengan demikian, merupakan proses "depluralisasi" masyarakat.⁷³

Integrasi diperlukan sebagai kuasa kumulatif dari pertentangan-pertentangan yang terdahulu antara kelompok-kelompok sosial. Ia memerlukan toleransi mutual, ketergantungan resiprok seperti realisasi kebutuhan bersama, dan ideologi bersama seperti nasionalisme,⁷⁴ arti kewarganegaraan nasional yang dapat ditanamkan di atas jaringan-jaringan loyalitas sub-nasional yang ada.⁷⁵ Keduanya merupakan alat untuk menangani ketegangan komunal dan mempromosikan hubungan antar-kelompok yang maju sekaligus karakter dari hubungan yang maju tersebut.⁷⁶ Nasionalisme menyediakan koalisi komunal dan menghubungkan massa dengan pemimpin politik.⁷⁷

Nasionalisme atau akomodasi nasional, merujuk pada strategi politik untuk masyarakat-masyarakat yang terfragmentasi secara komunal yang di dalamnya sistem politik mengakomodasi kelompok-kelompok komunal pada saat yang sama ketika ia berupaya untuk mem-

promosikan ukuran loyalitas bersama pada komunitas nasional.⁷⁸

Melalui akomodasi nasional kepentingan komunal diekspresikan oleh kompetisi politik yang damai, yang mengimplikasikan penerimaan legitimasi dari sistem politik dan aturan-aturannya. Terlebih, warganegara akan dipenuhi dengan kehendak untuk hidup bersama, yang akan memoderasi tuntutan dan orientasi mereka, dan mereka akan mempunyai rasa memiliki (*sense of belonging*) pada komunitas nasional.⁷⁹

Akomodasi nasional nampaknya menjadi puncak integrasi sosial dalam pluralisme. Robert A. Dahl menerima teori keseimbangan kelompok (*group-equilibrium*) sebagai deskripsi akurat yang pantas dari demokrasi Amerika (atau dalam terminologinya disebut 'poliarki' ~ *polyarchy*) ketika ia menyimpulkan bahwa sistem politik Amerika "nampak menjadi sistem yang relatif efisien untuk memperlakukan kembali persetujuan, mendorong moderasi, dan melanggengkan perdamaian sosial dalam masyarakat yang riuh dan tidak moderat yang menunjukkan masyarakat yang sangat besar, kuat, terbagi-bagi dan kompleks."⁸⁰

Namun, akomodasi nasional itu tidak identik dengan pluralisme yang terintegrasi (*integrated pluralism*) yang sangat berhasil mengintegrasikan seluruh masyarakat ke dalam identitas nasional bersama.⁸¹ Integrasi holistik tidaklah wajib dalam pluralisme.

⁷⁸*Ibid.*, hlm. 14.

⁷⁹*Ibid.*, hlm. 21.

⁸⁰"appears to be a relatively efficient system for re-enforcing agreement, encouraging moderation, and maintaining social peace in a restless and immoderate people operating a gigantic, powerful, diversified, and incredibly complex society." Seperti dikutip oleh Pennock, *op. cit.*, hlm. 482.

⁸¹Terdapat klasifikasi dari van den Berghe dalam mendeskripsikan pluralisme yang diekspresikan dalam wilayah politik. Dia menyatakan bahwa terdapat pluralisme stabil (*stable pluralism*) dan pluralisme transit (*transitory pluralism*). Pluralisme stabil dia artikan sebagai suatu situasi di mana kelompok-kelompok, terutama kelompok etnis, mengekalkan identitas mereka yang terpisah dan asimilasi yang banyak mengalami

⁷²Mazru'i dalam Kuper and Smith (eds.), *op. cit.*, hlm. 334-335.

⁷³*Ibid.*, hlm. 346.

⁷⁴*Ibid.*, hlm. 336.

⁷⁵Smock, *op. cit.*, hlm. 15.

⁷⁶*Ibid.*

⁷⁷*Ibid.*, hlm. 18.

b) Komunikasi

Teori pluralistik hanya mendeskripsikan penekanan pada diskusi daripada aklamasi dan pemilihan suara (*voting*). Sangatlah disadari tentang perlunya antar-komunikasi yang terus-menerus antara ide dan perasaan. Disadari bahwa proses ini cenderung meneruskan pada semua level, dari atas ke bawah, menggunakan seluruh jenis media dan organisasi, baik itu non-politis maupun yang politis. Ia tidak hanya kukuh menyatakan bahwa komunikasi itu harus dalam proses dua arah tetapi ia juga terutama mesti bersifat *mutual*.⁸²

Organisasi dan kelompok-kelompok informal yang tumbuh dalam demokrasi pluralis dikarakterisasikan, dalam berbagai tingkatan, oleh arus informasi, ide, sentimen, loyalitas, dan pengaruh yang bergerak ke atas dan ke bawah.⁸³

Kebijakan dalam masyarakat plural, dengan demikian, dipengaruhi oleh "komunikasi langsung" antara pemerintah dengan berbagai kepentingan yang terpengaruh, dan begitu pula lebih jujurnya untuk merefleksikan kepentingan masyarakat yang sejati.⁸⁴

c) Checks and Balances

Manajernen pluralisme adalah manajemen 'kompetisi komunal'.⁸⁵ Untuk menjelaskan intensitas dan konflik dalam masyarakat plural, Nordlinger menyebutkan enam strategi untuk rezim politik non-represif: koalisi pemerintahan stabil, prinsip proporsionalitas, mutual veto, depolitisasi bertujuan, kompromi atas isu-isu yang membagi kelompok-kelompok yang berkonflik, dan menyediakan konsesi-konsesi.⁸⁶

penentangan untuk banyak generasi (seperti bangsa Perancis di Quebec). Situasi pluralisme stabil itu dikontraskan dengan situasi-situasi pluralisme transit di mana kelompok-kelompok imigran, walaupun mereka dapat diukur, sadar-diri, dan diorganisasi, menjadi terasimiliasi di dalam dua atau tiga generasi (seperti bangsa Irlandia di Amerika Serikat). Van den Berghe, hal. 81.

⁸²*Ibid.*, hlm. 483.

⁸³*Ibid.*

⁸⁴Harrison, *op. cit.*, hlm. 67.

⁸⁵Smock, *op. cit.*, hlm. 2.

⁸⁶Nordlinger as referred by Smock, *ibid.*, hlm. 16.

Dalam pluralisme, sistem konstitusional *checks and balances* itu tidak hanya milik legislatif, eksekutif, dan yudikatif, ia juga untuk seluruh masyarakat. Adanya kelompok-kelompok perantara menyediakan basis untuk *system social checks and balances*, "distribusi kekuasaan yang memberikan kontribusi pada kelangsungan pluralisme politik."⁸⁷

Dalam sistem pluralisme peningkatan intervensi Negara pada sistem ekonomi, misalnya, telah membawa pada partisipasi yang lebih besar oleh kelompok-kelompok kepentingan dalam proses pembuatan-kebijakan dan telah menekan ketergantungan yang lebih besar atas persetujuan mereka. Adalah mungkin di sini bahwa penggunaan kampanye publik oleh kelompok-kelompok penekan (*pressure groups*) boleh jadi meningkat. Dan trend ini nampaknya akan terus berjalan, dan bahwa mereka pada akhirnya harus cenderung melemahkan kuasa partai-partai politik, terutama para pemimpin politik.⁸⁸

d) Korporasi

Pluralisme adalah segmentasi kelompok korporat ke dalam unit-unit yang secara institusional identik dan diferensiasi atau spesialisasi institusional.⁸⁹ Dalam kelompok korporat, perbedaan kultural dan variasi nilai mencegah bentuk apapun dari aktivitas kerjasama atau aktivitas kebersamaan.⁹⁰ Ini dapat direalisasikan dengan kerjasama antar elit, karena kerjasama pada level elit "dapat berkompensasi pada kelemahan loyalitas-loyalitas yang saling bertentangan di tingkat massa."⁹¹

Di sini posisi Negara itu merupakan organ politik representative dari bagian yang berkuasa yang diatur sebagai kelompok korporat. Negara, kemudian, merupakan instrumen eksklusif dan tertinggi untuk

⁸⁷Kornhauser seperti dikutip oleh Kuper, *op. cit.*, hlm. 9.

⁸⁸Pennock, *op. cit.*, hlm. 497.

⁸⁹Van den Berghe dalam Kuper and Smith (eds.), *op. cit.*, hlm. 69.

⁹⁰Smock, *op. cit.*, hlm. 10.

⁹¹Lijphart, *loc. cit.*

dominasi internal dan kontrol korporat atas penduduk yang secara institusional berbeda, yang "secara terus-menerus ditolak hak-hak politik, kewarganegaraan, dan kesempatan mereka untuk organisasi mereka sendiri oleh resep-resep Negara, dan dengan demikian dilumpuhkan sebagai kategori-kategori korporat yang terpecah-belah."⁹²

Ini melebarkan konsep pluralisme pada level pluralisme individual, dalam artian partisipasi individual dalam kepelbagaian struktur plural. Distribusi pluralis atas peran-peran individual yang berbeda itu diharapkan: 1) untuk mempromosikan kepelbagaian kepentingan, 2) untuk membatasi loyalitas-loyalitas eksklusif, 3) untuk menghubungkan struktur plural secara bersama dengan ikatan-ikatan hubungan personal yang sangat banyak, dan 4) anggota kontribusi pada integrasi dengan mempromosikan penyebaran nilai-nilai bersama.⁹³

D. Kritik atas Pluralisme

Betapapun idealnya teori pluralisme itu, ia tidak dapat menghindari hujan kritik. Hal pertama ialah karena kecenderungannya pada kekacauan sipil karena prinsipnya yang bersifat "persamaan kuasa". Sebagian teoretisi pluralisme politik menemukan basis bagi tatanan dan integrasi demokratis ada pada persamaan kuasa antar kelompok, dan kesalingbatasan (*mutual restraint*) yang konsekuen.⁹⁴ Ini nampaknya merupakan basis yang tidak cukup. Memang, persamaan relatif dapat menjadi sumber konflik dan stimulus pada dominasi bagian (*sectional domination*). Di situlah David Easton menulis bahwa, dalam pandangan bukti yang tidak meyakinkan yang mendukung hipotesis bahwa persamaan dalam kuasa menimbulkan batasan, sehingga membawakan pada "ketakutan, semi kelumpuhan dalam resolusi perbedaan penting antar-kelompok dan akhirnya mengundang pada kekerasan untuk

menangani situasi yang tidak mungkin."⁹⁵ Kornhauser menambahkan bahwa "tidak ada hubungan yang sederhana antara luasnya kuasa itu didistribusikan secara merata dengan stabilitas tatanan demokratis."⁹⁶

Persamaan itu sendiri, pada faktanya, tidak beroperasi. Dalam tradisi Liberal, "stabilitas masyarakat plural dilihat sebagai rentan dan diancam oleh pembelahan tajam antara bagian-bagian plural yang berbeda, yang hubungan-hubungan satu sama lain itu secara umum dikarakterisasi oleh ketimpangan."⁹⁷ Persamaan antara manusia secara individual dan antar Negara secara keseluruhan merupakan ketidakmungkinan yang alamiah atau biologis. Pencarian untuk *utopia* yang di dalamnya semua dapat setara adalah mimpi yang tidak mungkin dicapai.⁹⁸ Pluralisme, dengan demikian, tidaklah demokratis karena keseimbangan tidak terjadi. Pada faktanya, sebagian kelompok itu lebih berkuasa daripada yang lain. Sebagian kepentingan hilang tidak terrepresentasi.⁹⁹

Kritik atas pluralisme menyatakan bahwa kaum pluralis itu sekurang-kurangnya terpaukan tentang apatisisme massa dan ketidaktahuan politik mereka dan bahwa ini cenderung menjadi pertahanan diri atas elitisme yang ada dan lebih dari saran bahwa ini adalah apa yang dikehendaki.¹⁰⁰ Elit telah, dalam banyak kasus, menjadi oligarki jauh dan keanggotaan massa itu tidaklah terlibat juga

⁹⁵Ibid.

⁹⁶Ibid.

⁹⁷Kuper, *ibid.*, hlm. 7.

⁹⁸Brian M. Bullivant, *The Pluralist Dilemma in Education: Six Case Studies*, Sydney, George Allen & Unwin, 1981, hlm. 244.

⁹⁹Harrison, *op. cit.*, hlm. 69. Beberapa pengamat mengklaim bahwa negara-negara yang mendeklarasikan dan mempromosikan diri menjadi pluralistik itu secara ekonomi berdasarkan pada perusahaan-perusahaan transnasional yang mengontrol ekonomi negara-negara Dunia Ketiga, dengan demikian negara-negara tersebut itu kurang pluralistik. Nurit Kliot and Stanley Waterman, *op. cit.*, hlm. 5.

¹⁰⁰Pennock, *op. cit.*, hlm. 514.

⁹²Smith dalam Kuper and Smith (eds.), *op. cit.*, hlm. 23.

⁹³Kuper in *ibid.*, hlm. 91.

⁹⁴*The Political System* (New York: Knopf, 1953), hlm. 303, seperti dikutip oleh Kuper, *ibid.*, hlm. 17.

tidak berkomitmen, dengan demikian, pada prosedur resolusi konflik.¹⁰¹

Konsekuensinya, pluralisme juga nampak mempromosikan alienasi individual. Para kritikus menyatakan bahwa dalam pluralisme, banyak, mungkin kebanyakan, warganegara begitu kecil partisipasinya dalam kelompok-kelompok yang mempunyai pengaruh politik yang mereka secara efektif dirintangi dari manfaat-manfaat proses kelompok. Konsekuensinya warganegara merasa dan memang secara politik tidak berkuasa. Mereka cenderung teralienasi dari politik.¹⁰² Perasaan ini juga datang dari sentralisasi kuasa politik yang canggih.¹⁰³

Secara teknis, pluralisme nampaknya menyerahkan operasi politik itu berada di tangan pemerintah. Cythia Enloe menganggap Negara-negara plural itu merupakan perkumpulan-perkumpulan artifisial yang sering dilanggengkan oleh operasi daripada oleh tujuan-tujuan mulia dari pembangunan politik.¹⁰⁴

Akhirnya, pluralisme adalah sistem politik yang mendorong kompetisi daripada kerjasama, dan privatisme (kepentingan-diri atau keegoan individu) daripada spirit komunitas dan kepentingan publik.¹⁰⁵

E. Pengaruh Pluralisme Politik

Walaupun banyak yang mengkritiknya, pluralisme mempunyai pengaruh yang kuat di dunia Negara-bangsa. Konsep pluralisme, dalam artian politik, mulai diterima secara mendunia pada tahun 1960an,¹⁰⁶ terutama di

dunia Barat. Sejak saat itu Negara demi Negara, baik yang industrialis maupun yang berkembang, sudah merasa perlu akan politisasi atas pluralisme.¹⁰⁷ Demikian karena perbedaan-perbedaan agama, etnis, linguistik, regional, dan rasial telah menjadi poin-poin rujukan yang menjadi lebih utama dalam proses politik.¹⁰⁸

Ada juga penyesuaian dengan pluralisme di Negara-negara Muslim akhir-akhir ini. Ini disebabkan fakta bahwa "demokrasi dan budaya politik pluralisme, hak asasi manusia, dan toleransi liberal merupakan produk-produk dasar dari modernitas budaya."¹⁰⁹ Konsep pluralisme, di antara produk-produk lain dari modernitas kultural, dilihat sebagai tantangan pada negeri-negeri Muslim, "mengadopsinya diposisikan sebagai tanda telah suksesnya bergabung dengan jajaran bangsa-bangsa yang berperadaban."¹¹⁰

Dalam negara-negara berbahasa Arab, pluralisme telah diadopsi dalam istilah *ta'addud* sejak tahun 1980an dan menjadi kata-kata yang sering didengungkan pada tahun 1990an.¹¹¹ Begitu pula dalam bahasa-bahasa lain seperti bahasa Indonesia (*kemajemukan*) dan Malaysia (*majmuk*) istilah itu telah diadopsi. Di negeri-negeri Muslim respons pluralisme itu bervariasi. Sebagiannya melihat sebagai "antithesis kepada" Islam, sebagiannya melihatnya sebagai "bersesuaian dengan"

monisme (artinya absolutisme) dan sebaliknya dalam pandangan sifat multi-segi realitas. Pluralisme itu sering digunakan sebagai sinonim dari kepelbagaian (*diversity*) dan seringkali digunakan dalam kajian-kajian etnis. Namun, dalam artian politik, ia merujuk secara langsung pada otoritas kuasa. Nurit Kliot and Stanley Waterman, *op. cit.*, hlm. 1.

¹⁰⁷Smock and Smock, *op. cit.*, hlm. 1.

¹⁰⁸*Ibid.*

¹⁰⁹Bassam Tibi, *The Challenge of Fundamentalism: Political Islam and the New World Disorder*, University of California Press, Berkeley-Los Angeles-London, 1998, hlm. 24.

¹¹⁰Yvonne Y. Haddad, *op. cit.*, hlm. 3.

¹¹¹*Ibid.*

¹⁰¹Harrison, *loc. cit.*

¹⁰²Pennock, *op. cit.*, hlm. 513.

¹⁰³Smock menyatakan bahwa dalam pluralisme politik, "sentralisasi kekuasaan politik telah begitu maju sehingga warganegara merasa hampir telanjang di hadapan pemerintah yang anonym dan jauh dan memerlukan sejenis identitas yang dengannya dapat membajui dirinya sendiri untuk member makna pada eksistensinya." Smock, *op. cit.*, hlm. 5.

¹⁰⁴Seperti dikutip oleh Smock, *ibid.*

¹⁰⁵Pennock, *op. cit.*, hlm. 514.

¹⁰⁶Konsep pluralisme itu sendiri sudah berumur satu abad dan didefinisikan hanya mengikuti definisi

Islam, sisanya melihatnya sebagai "esensi Islam yang sebenar-benarnya."¹¹²

Setelah kesuksesannya dalam kehidupan politik, pluralisme, kemudian, menjadi mode pemikiran. Istilah itu tersebar di hampir setiap kehidupan sosial: di dunia ekonomi, di wilayah filosofis, di lapangan teologi, dan sebagainya.[]

DAFTAR PUSTAKA

- Bullivant, Brian M., *The Pluralist Dilemma in Education: Six Case Studies*, Sydney: George Allen & Unwin, 1981.
- Dahl, Robert A., *Pluralist Democracy in the United States: Conflict and Consent*, Chicago: Rand Mc. Nally & Co, 1967.
- Haddad, Yvonne Y., *Islamists and the Challenge of Pluralism*, Occasional Papers, Center for Contemporary Arab Studies and Center for Muslim-Christian Understanding, Georgetown University, 1995.
- Harrison, Reginald J., *Pluralism and Corporatism: The political evolution of modern democracies*, London: George Allen & Unwin, 1980.
- Kliot, Nurit and Waterman, Stanley (eds.), *Pluralism and Political Geography: People, Territory and State*, New York, St. Martin's Press, 1983.
- Kuper and Smith (eds.), *Pluralism in Africa*, Berkeley, University of California Press, 1969.
- Lijphart, Arend, *The Politics of accommodation: Pluralism and Democracy in the Netherlands*, Berkeley, University of California Press, 1968.
- Pennock, J. Roland, *Democratic Political Theory*, New Jersey, Princeton University Press, 1979.
- Riley, Jonathan, *Defending Cultural Pluralism: Within Liberal Limits*, *Political Theory*, Vol. 30, Number 1, February 2002.
- Saunders, J.J., *The History of Medieval Islam*, London, Routledge & Kegan Paul, 1982.
- Smith, M. G., *The Plural Society in the British West Indies*, Berkeley, University of California Press, 1965.
- Smock, David R. and Smock, Audrey C., *The Politics of Pluralism, A Comparative Study of Lebanon and Ghana*, New York/Oxford/Amsterdam, Elsevier, 1975.
- Spencer-Trimingham, *Christianity Among the Arabs in Pre-Islamic Times*, London: Longman, 1979.
- Tibi, Bassam, *The Challenge of Fundamentalism: Political Islam and the New World Disorder*, University of California Press, Berkeley-Los Angeles-London, 1998.
- Yousif, Ahmad, *Islam, Minorities and Religious Freedom: A Challenge to Modern Theory of Pluralism*, *Journal of Muslim Minority Affairs*, Vol. 20, No. 2, 2000.

¹¹²Ibid.